

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami transformasi yang signifikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, prinsip otonomi yang luas digunakan yang memiliki arti bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang tidak berada di bawah kendali pemerintah pusat. Diberikannya otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Otonomi daerah sering kali dikaitkan dengan seberapa besar dana yang dapat dimobilisasi oleh daerah guna membiayai pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, implementasi daerah tidak bisa dipisahkan dengan konsep desentralisasi fiskal. Pada dasarnya desentralisasi fiskal adalah upaya untuk memberdayakan daerah dalam mengatur pembangunan di daerahnya. Desentralisasi fiskal berperan sebagai sumber pendanaan atas urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh daerah (Uliansyah, 2021). Christia & Ispriyarso dalam Priambodo (2024) berpendapat bahwa desentralisasi fiskal memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan potensi ekonomi di daerahnya untuk menyelesaikan masalah di daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah

diharapkan dapat memaksimalkan potensinya untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan agenda prioritas daerah. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam provinsi-provinsi kemudian dibagi lagi ke dalam wilayah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerahnya.

Peran pemerintah daerah diharapkan mampu untuk membiayai terhadap apa saja penyelenggaraan pemerintah daerahnya, oleh sebab itu pemerintah daerah masing-masing dituntut agar bisa lebih aktif lagi dalam mengelola dana penerimaan pemerintah. Otonomi daerah harus mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya (Suharlina, 2024).

Sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah salah satunya itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mendefinisikan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan daerah lain yang sah serta sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah ini menjadi salah satu sumber dari penerimaan daerah, karena hasil dari kekayaan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian ekonomi suatu daerah khususnya dalam

pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera dan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

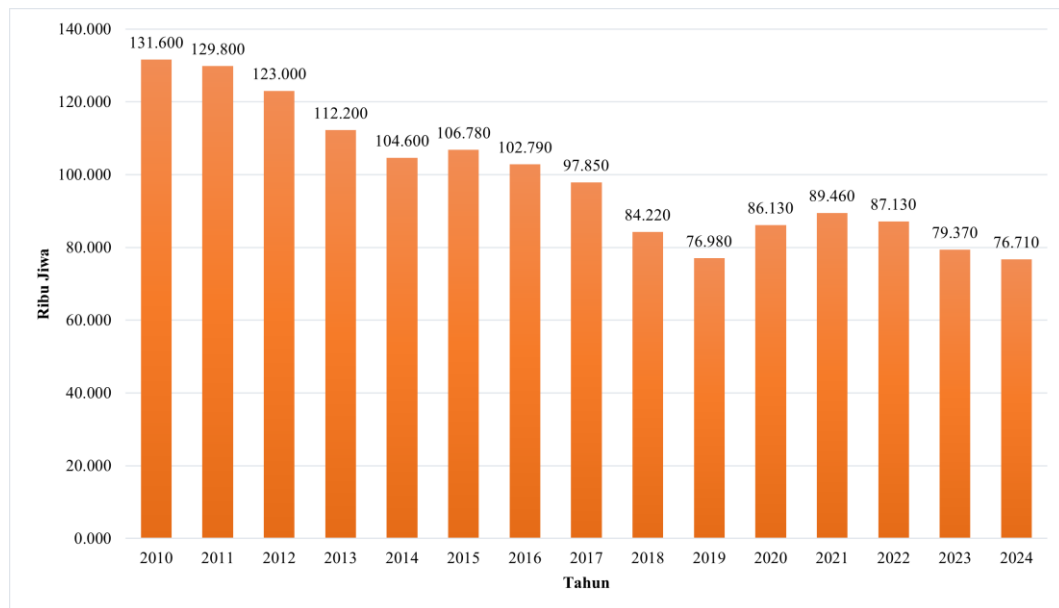
Kemiskinan merupakan musuh dari tujuan otonomi daerah. Isu kemiskinan yang saat ini masih terjadi di Indonesia merupakan masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah, utamanya dalam lingkup daerah dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan kompleks yang penanganannya itu harus dalam berupa program khusus. Banyak faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menanggulangi kemiskinan, antara lain; konsep, pendekatan, strategi, rumusan, teknik, dan pelaksana serta keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Idealnya, faktor-faktor tersebut harus tercakup dalam satu dokumen lengkap dan dalam satu program, sehingga mampu mengatasi masalah kemiskinan secara tepat dan komprehensif. Apabila salah satu faktor terabaikan, maka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan akan semakin terbuka, yang kemudian dapat berimplikasi pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penanganan masalah kemiskinan ini harus tepat dan efektif agar tidak merembet dan menimbulkan masalah lainnya.

Secara kelembagaan, upaya untuk menanggulangi kemiskinan tentunya masih terus dilakukan oleh pemerintah, namun angka kemiskinan hingga saat ini masih relatif tinggi. Salah satu daerah di Jawa Barat dengan angka kemiskinan yang masih tinggi jika dibandingkan dengan nasional adalah Kota Tasikmalaya. Kemiskinan di Kota Tasikmalaya, masih di atas rata-rata angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dan nasional. Pada tahun 2020 angka kemiskinan di Jawa Barat sebesar 7,88%, nasional sebesar 9,78%, sedangkan Kota Tasikmalaya sebesar

12,97%. Kemudian pada tahun 2021 angka kemiskinan di Jawa Barat sebesar 8,4%, nasional sebesar 10,14%, sedangkan di Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 13,13%. Pada tahun 2022 angka kemiskinan di Jawa Barat turun menjadi sebesar 8,06%, nasional sebesar 9,54%, sedangkan Kota Tasikmalaya 12,72%. Kemudian pada tahun 2023 angka kemiskinan di Jawa Barat sebesar 7,62%, nasional 9,36%, sedangkan Kota Tasikmalaya 11,53%. Dan pada tahun 2024 angka kemiskinan di Jawa Barat turun lagi menjadi sebesar 7,46%, untuk nasional sebesar 9,03%, sedangkan Kota Tasikmalaya sebesar 11,1%.

Masalah kemiskinan di Kota Tasikmalaya menjadi cukup rumit karena luas wilayah, beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat, dan pengalaman kemiskinan yang berbagai. *Tasik Research and Consultant* (TRC) merilis hasil survey bahwa angka kemiskinan Kota Tasikmalaya berada pada angka 40,8%. Hal tersebut menjadi masalah serius yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya. Selain itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Kota Tasikmalaya juga menduduki urutan ketiga termiskin di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022-2023 dengan ratio gini kurang lebih 0,4% yang memiliki arti bahwa pendapatan rata-rata masyarakat Kota Tasikmalaya masih di bawah standar.

Terlepas dari urutan ketiga termiskin di Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya memiliki tren yang negatif dari tahun ke tahun. Meskipun ada penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan, proses tersebut terjadi secara bertahap dan masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah data jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya tahun 2010 sampai 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024, diolah kembali)

**Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Tasikmalaya
Tahun 2010-2024 (Ribu Jiwa)**

Sejalan dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada gambar 1.2, kemiskinan di Kota Tasikmalaya berangsur-angsur turun dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Namun, di tahun 2020, efek pandemi COVID-19 berhasil menyebabkan kenaikan pada angka kemiskinan dan puncaknya terjadi pada tahun 2021 yang mencapai angka 89.460 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Tasikmalaya mengalami penurunan sampai tahun 2024.

Mencermati fakta empiris yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya itu relatif tinggi, yaitu di atas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya itu masih menjadi masalah utama yang membutuhkan penanggulangan secara efektif dan komprehensif.

Kota Tasikmalaya juga menjadi salah satu daerah yang menjalankan otonomi daerah. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi pemerintah Kota

Tasikmalaya untuk mengurus sendiri tatanan pemerintahan mulai dari perekonomian, pembangunan, dan pembiayaan pemerintahan lainnya. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah Kota Tasikmalaya mengandalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terbukti dengan peningkatan yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya setiap tahunnya yang memberikan makna bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya sudah tidak lagi bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2020	314.312.317.300
2021	445.325.179.910
2022	341.362.213.700
2023	363.879.499.575
2024	353.665.538.400

Sumber: Badan Pusat Statistik, JDIH Pemerintah Kota Tasikmalaya, dan PPID Kota Tasikmalaya (2024)

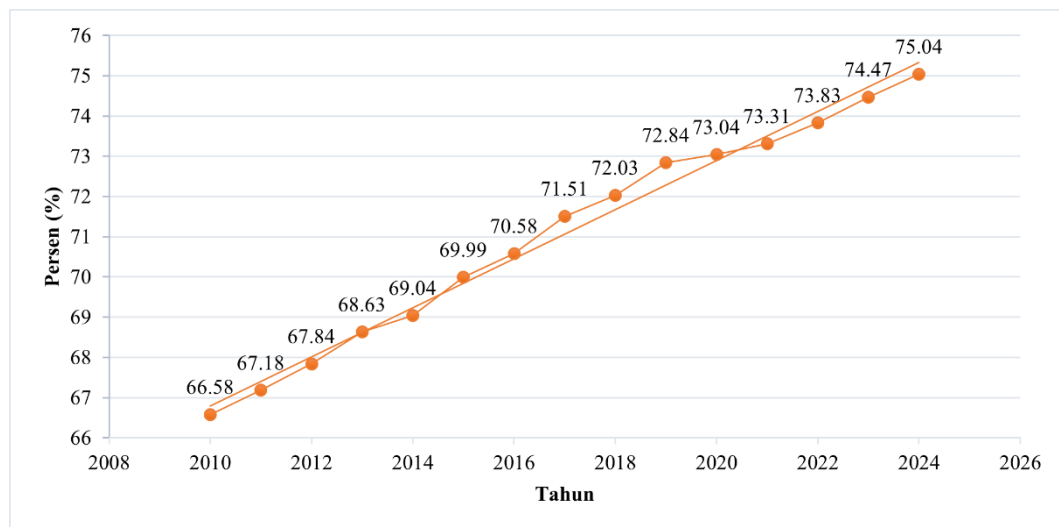
Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Penerimaan tertinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya diperoleh pada tahun 2021 sebesar Rp445.325.179.910 dan penerimaan terendah diperoleh pada tahun 2020 sebesar Rp314.312.317.300. Kenaikan drastis pada tahun 2021 tersebut disebabkan karena perekonomian mengalami pemulihan meskipun belum

sepenuhnya stabil setelah terdampak oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 menurun menjadi Rp341.362.213.700 dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp363.879.499.575 yang kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2024 menjadi Rp353.665.538.400. Meskipun terus mengalami fluktuasi dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tasikmalaya sudah cukup baik dan kemandirian pemerintah daerah Kota Tasikmalaya sudah dapat terlihat.

Namun keberhasilan penerapan otonomi daerah tidak hanya dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja, melainkan juga dari seberapa efektif pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerahnya. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya lokal secara langsung, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa daerah tersebut akan otomatis menjadi lebih makmur.

Sejatinya kesuksesan dalam otonomi daerah tercermin ketika ada dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerahnya, seperti pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang memadai, serta pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Karena meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi tidak diimbangi dengan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan, maka otonomi daerah belum dapat dianggap berhasil sepenuhnya.

Kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan sebagai keadaan di mana seluruh individu memperoleh kecukupan dalam segala hal aspek kebutuhan, baik kebutuhan yang bersifat materil maupun spiritual. Definisi ini diperkuat oleh Faisal Basri dalam Oktaviani dan Fauzan (2024) yang menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi individu-individu dalam suatu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, tidak hanya secara materi tetapi juga dalam hal-hal yang bersifat spiritual dan emosional. Kualitas hidup masyarakat di suatu daerah tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut adalah data yang menunjukkan IPM Kota Tasikmalaya dari tahun 2010 sampai 2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024, diolah kembali)

Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tasikmalaya Tahun 2010-2024 (Persen)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa angka IPM Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tren yang positif dengan peningkatan yang tipis setiap tahunnya ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah Kota Tasikmalaya sudah berhasil dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD)

meskipun belum berjalan secara maksimal. Peningkatan IPM ini membuktikan bahwa adanya perbaikan dalam akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pemutusan rantai kemiskinan sangat memerlukan peran pemerintah daerah. Kadafi dalam Putra dan Sayifullah (2023) menyatakan peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ditunjukkan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Pada komponen pendapatan di tiap pemerintah daerah itu diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, pemerintah daerah memiliki kemampuan dan juga keleluasaan finansial yang lebih besar untuk membiayai program-program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, contohnya seperti peningkatan pada layanan publik. Ketika layanan publik tersebut dikelola dengan baik, akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar akan meningkat yang pada akhirnya akan mendorong produktivitas dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Sebaliknya, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, pemerintah daerah akan lebih bergantung pada transfer dari pusat, yang sering kali kurang fleksibel untuk menangani kebutuhan spesifik di wilayahnya. Dengan demikian, PAD yang optimal dan pengelolaan yang efisien menjadi salah satu kunci untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, ketiga variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat memiliki korelasi yang erat. Secara umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan. Artinya, apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, maka akan

menurunkan kemiskinan. Begitu juga dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang pada umumnya memiliki hubungan negatif. Artinya, apabila kemiskinan meningkat, maka akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada umumnya memiliki hubungan positif. Artinya, apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hubungan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Priambodo (2020), pada penelitiannya mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Syamsul (2020) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada 33 pemerintah provinsi di Indonesia. Selain itu, Adriawan (2022) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Prabowo (2020) mengungkapkan bahwa pembangunan manusia akan berdampingan dengan tingkat kemiskinan dan IPM sebagai indikator dari kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat kemiskinan. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar dan Prabowo (2023) yang menemukan bahwa kemiskinan dan IPM itu pengaruhnya bersifat negatif.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Suganda (2019) menemukan bahwa kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Temuan yang serupa juga dilakukan oleh Supadmi (2016) yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan IPM di Provinsi Bali.

Melihat penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya terdapat hubungan timbal balik antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya. Hingga saat ini belum ada penelitian yang meneliti mengenai hubungan timbal balik atau kausalitas antar variabel tersebut di Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kausalitas Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kemiskinan, dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2010-2024”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah-masalah pokok yang akan diteliti yaitu sebagai berikut.

1. Apakah terdapat hubungan jangka panjang antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kemiskinan, dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2010-2024?
2. Apakah terdapat hubungan jangka pendek antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kemiskinan, dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2010-2024?
3. Bagaimana arah hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kemiskinan, dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2010-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah-masalah pokok yang telah dirumuskan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan jangka panjang antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kemiskinan, dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2010-2024.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan jangka pendek antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kemiskinan, dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2010-2024.
3. Untuk mengetahui bagaimana arah hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kemiskinan, dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2010-2024.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan ataupun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini baik secara akademis maupun secara praktis adalah sebagai berikut.

1.4.1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan terkait dengan hubungan timbal balik antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kemiskinan, dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tasikmalaya serta diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang memiliki tema relevan ataupun yang memiliki ketertarikan terhadap hubungan kausalitas antar variabel sekaligus sebagai perbandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ingin diteliti dan dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kemiskinan, dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tasikmalaya yang terjadi. Selain itu, bagi pihak-pihak yang terkait, seperti pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kemiskinan, dan Kesejahteraan Masyarakat.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tasikmalaya yang berada di wilayah Priangan Timur Provinsi Jawa Barat dan terletak di antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut. Secara geografis, Kota Tasikmalaya terletak di posisi antara 108°08'83"-108°24'02" BT dan 7°10"-7°26'32" LS di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat. Kedudukan atau jarak Kota Tasikmalaya dari ibukota provinsi Jawa Barat yaitu ± 105 km dan dari ibukota negara ± 225 km.

1.5.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025, dimulai sejak bulan September 2024 diawali dengan pengajuan judul kepada pihak Jurusan Ekonomi Pembangunan dan diakhiri dengan ujian skripsi pada bulan Juni 2025. Adapun rincian rencana kegiatan penelitian ini ditampilkan pada tabel berikut.

